

NEGARA DALAM PERSPEKTIF PLATO

Abdul Hakim

Dosen Jurusan Aqidah-Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari
Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3266593 e-mail:
abdul_hakimkdg@yahoo.co.id

Diterima 10 Oktober 2009/ Disetujui 15 Desember 2009

Abstract

According to Plato, the aim of establishing a state is to achieve pleasures and happiness for all citizens based on justice, wisdom, courage and solidarity. To attain the aim, the citizens should have knowledge, especially knowledge of virtues, and try to realize them in their daily lives. The king, as the top leader of the state, should have the highest level of the knowledge. The king should be a philosopher.

Kata kunci: *negara ideal, negara utopia, dan aristokrasi.*

Pendahuluan

Dalam pembicaraan tentang negara, khususnya di negeri kita, perbincangan mengenai hakikat negara biasanya seringkali luput dari pusat perhatian kita. Kebanyakan dari masyarakat kita sepertinya melihat bahwa hakikat negara seakan-akan sudah jelas. Ia merupakan sebuah kenyataan yang tak terelakkan, hadir dan selalu ada pada setiap zaman, sehingga tidak perlu lagi mempersoalkan tentang hakekat, apalagi asal-usul mengapa negara terbentuk dan ada seperti yang kita kenal sekarang ini.¹

Pembicaraan tentang negara pun kemudian biasanya dibatasi pada masalah-masalah aktual, masalah-masalah “kekinian”. Seperti misalnya kesalahan-kesalahan penguasa lama saat ia digulingkan dari kursi pemerintahan, atau juga seperti soal pertarungan kelompok-kelompok

¹Edy Haryadi, *Lenin: Pikiran, Tindakan dan Ucapan*, (Jakarta: Komunitas Studi Untuk Perubahan, 2000), Cet. ke-1, h. 1.

kepentingan politik yang tengah berseteru untuk memperoleh kursi kekuasaan.

Teori-teori kenegaraan yang berkembang di Indonesia mayoritas merupakan teori-teori filsuf idealis liberal yang sampai sekarang dominan di Eropa dan Amerika, seperti teori Rosseau dan Hobbes. Teori ini berasumsi bahwa negara merupakan sebuah kenyataan yang tak terelakkan bagi umat manusia. Negara mutlak ada pada setiap zaman karena kebutuhan manusia untuk mengatur dirinya. Negara kemudian dianggap sebagai wasit yang netral untuk menengahi setiap konflik yang terjadi di masyarakat.²

Kenyataan di atas kemudian membuat penulis bertanya tentang kebenaran teori-teori negara dari para filsuf idealis liberal tadi. Apakah benar negara itu merupakan sesuatu yang mutlak ada, semacam takdir yang tidak terelakkan bagi umat manusia? Apakah benar negara sepenuhnya netral?

Implikasi dari teori ini, bahwa yang menjadi pola jawab umum penguasa selama ini adalah setiap krisis dan gejolak sosial yang terjadi haruslah menjadi tanggung jawab bersama. Stereotipe ini rupanya berangkat dari tesis dasar bahwa suatu negara adalah hasil kesepakatan bersama, dan karena itu, menjadi tanggungjawab bersama untuk memeliharanya. Bahkan setiap kesalahan dilihat sebagai kesalahan bersama, karena itu juga menjadi tanggungjawab bersama.³

Kenyataan yang sangat jelas kita alami bersama selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru yang jauh dari apa yang disebut dengan “demokrasi” dan tidak menciptakan masyarakat madani, rakyat dihambat untuk ikut berbicara, tidak terwujudnya hak-hak rakyat untuk menikmati hak-hak dasar mereka sebagai manusia, munculnya rasa ketakutan rakyat untuk berbicara masalah negara, aspirasi rakyat terabaikan, bahkan hak-hak rakyat digerogeti penguasa (baca : KKN).

Dari fenomena di atas, maka jelas sekali bahwa eksistensi sebuah negara sangat erat sekali dengan moralitas pemimpin atau penguasa

²Haryadi, *Lenin: Pikiran, Tindakan dan Ucapan...*, h. v.

³Tim Maula (ed.), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), Cet. ke-1, h. 57.

negara itu sendiri. Plato mengatakan: “Apabila manusia baik negara pun baik dan apabila negara baik itu berarti manusia pun baik; sebaliknya apabila manusianya pun buruk, negara pun buruk, itu berarti manusianya pun buruk. Negara adalah pencerminan manusia yang menjadi warganya.”⁴

Refleksi kefilosofan Plato dalam masalah kenegaraan inilah yang menarik penulis untuk membahasnya dalam artikel ini.

Biografi Plato

Tempat dan tahun kelahiran Plato sesungguhnya tidak diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan Plato lahir di Athena, ada juga yang mengatakan ia lahir di Aegina. Demikian juga dengan tahun kelahirannya, ada yang mengatakan ia lahir pada tahun 428 SM, ada juga yang mengatakan ia lahir pada tahun 427 SM. Yang pasti ialah Plato lahir dalam suatu keluarga aristokrat Athena yang turun-temurun memiliki peranan yang amat penting dalam kehidupan politik Athena. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan raja Kodrus, raja terakhir Athena yang hidup sekitar tahun 1068 SM yang sangat dikagumi rakyatnya oleh karena kecakapan dan kebijaksanaannya memerintah negeri Athena.⁵ Dikabarkan Ariston adalah tetesan dewa Poseidon.⁶ Ibunya bernama Periktione keturunan Solon tokoh legendaris dan negarawan agung Athena.

Nama Plato yang sebenarnya ialah *Aristokles*, karena dahinya dan bahunya yang amat lebar, ia memperoleh julukan Plato (bahasa Yunani *platos* = lebarnya) dari seorang pelatih senamnya. Julukan itu begitu cepat populer dan menjadi panggilannya sehari-hari, bahkan kemudian menjadi nama resmi yang diabadikannya lewat seluruh karyanya.⁷

Semasa kecil Plato sudah mendapatkan pelajaran menggambar dan melukis, di samping pelajaran musik dan puisi. Sebelum beranjak dewasa

⁴J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), Cet. ke-3, h. 1.

⁵Rapar, *Filsafat Politik Plato....*, h. 41.

⁶Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. ke-1, h. 252.

⁷Rapar, *Filsafat Politik Plato....*, h. 41.

ia sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Sebagaimana kebiasaan anak-anak dimasa itu Plato mendapatkan pendidikan dari guru-guru filsafat. Pelajaran filsafat pertama kali dikenalnya melalui Kratylos, murid Herakleitos. Selanjutnya sejak berumur 20 tahun ia mengikuti pelajaran Socrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasan baginya. Pengaruh Socrates sangat mendalam pada dirinya. Ia menjadi murid Socrates yang setia, dan sampai akhir hayatnya Socrates tetap menjadi pujaannya.⁸

Plato lahir ketika puncak kejayaan pemerintahan demokratis Athena yang berada di bawah pimpinan Pericles baru saja berlalu. Ia dilahirkan dan tumbuh menjadi dewasa pada saat perang Peloponesos sedang berkobar. Ia menyaksikan kekalahan Athena dalam perang Peloponesos itu pada tahun 404 SM. Bagi Plato, kekalahan Athena itu merupakan akibat dari ketidakmampuan sistem demokratis untuk memenuhi kebutuhan rakyat di bidang politik, moral dan spiritual.

Kekalahan Athena telah merangsang semangat plato untuk menempuh karir politik, apalagi ketika terbentuk pemerintahan “oligarkis-aristokratis” yang dikenal dengan nama “kelompok tiga puluh tyrannoi”. Kelompok ini hanya berkuasa selama 8 bulan di Athena, dan setelah itu golongan demokratis kembali memerintah Athena. Hal ini membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Athena, termasuk Plato dan gurunya, Socrates.⁹

Cita-cita dan ambisi Plato menjadi seorang politikus akhirnya padam, setelah kematian gurunya, Socrates.¹⁰ Socrates ditangkap dengan tuduhan merusak dan meracuni para pemuda dan mengembangkan ajaran baru di Athena, yang akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah demokratis waktu itu.

Plato melihat adanya ketidakberesan sistem pemerintahan yang ada pada masa itu dan moralitas para penguasa yang sangat bobrok. Menurut Plato pemerintahan suatu negara akan menjadi baik apabila

⁸Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), Cet. ke-3, h. 87-88.

⁹Rapar, *Filsafat Politik Plato...*, h. 42-43.

¹⁰Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), Cet. ke-9, h. 38.

kekuasaan dalam negara diserahkan kepada para filsuf. Hanya para filsuf lah yang paling tepat menjadi raja, atau raja harus menguasai filsafat, barulah suatu pemerintahan akan berhasil membebaskan rakyatnya dari segala bentuk kesengsaraan dan duka nestapa.¹¹

Setelah kematian Socrates, Plato banyak melakukan pengembaraan dari suatu negeri ke negeri lain, di antaranya ke Italia dan Sisilia. Pada saat kembali dari pengembaraannya, Plato mendirikan sekolah “Akademi” (dekat kuil pahlawan Akademos). Maksud Plato mendirikan sekolah itu untuk memberikan pendidikan yang intensif dalam ilmu pengetahuan dan filsafat.¹² Di tempat itulah Plato, sejak berumur 40 tahun sampai meninggalnya pada usia 80 tahun, mengajarkan filsafatnya dan mengarang tulisan-tulisan yang tersohor sepanjang masa.¹³

Tulisan-tulisan Plato yang berjumlah lebih dari 30 tulisan mengandung keindahan dan kemurnian. Karya-karya Plato memakai bentuk sastra yang dinamakan *dialog* yang terdiri dari percakapan-percakapan antara dua orang atau lebih mengenai ide yang penting atau ideal. Tulisan-tulisannya yang permulaan mungkin mencerminkan pandangan Socrates secara langsung. Akan tetapi dalam tulisan-tulisan yang kemudian, pelaku yang dinamakan Socrates adalah jawaban dari sikap filsafat Plato sendiri. Karya-karyanya yang sangat dikenal diantaranya adalah: *Apology dan Crito*, yang keduanya membicarakan tentang peradilan Socrates dan percakapan-percakapannya yang terakhir; *Euthyphro* yang membicarakan tentang kesalehan (*piety*); *Phaedo* yang memusatkan pembicaraan “*Idea of the Good*”; dan *The Republic*, karangan terbaik Plato yang membicarakan tentang keadilan dan negara ideal.¹⁴

¹¹Rapar, *Filsafat Politik Plato*..., h. 43-44.

¹²Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*..., h. 38.

¹³Hatta, *Alam Pikiran Yunani*..., h. 90.

¹⁴Harold H. Titus, *et.al., Living Issues in Philosophy*, diterjemahkan oleh M. Rasjidi dengan judul *Persoalan-persoalan Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Cet. ke-1, h. 320.

Negara Ideal Menurut Plato

1. Pengertian dan Hakikat Negara

Satu pertanyaan yang sering mengusik para pemikir politik dan kenegaraan, apa sebenarnya negara itu? Definisi tentang negara berjumlah hampir sebanyak pemikirnya, sesuai pengertian dan pemahamannya yang tentu saja tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta kenyataan yang hidup di sekitarnya yang berada dalam konteks sejarah dan budayanya.

Secara leksikal negara mengandung arti: 1) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, 2) kelompok sosial yang memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹⁵

Musdah Mulia dalam bukunya *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* menyebutkan:

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital. Suatu negara paling sedikit harus mempunyai tiga unsur, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintah. Dari ketiga unsur tersebut terlihat bahwa pemerintah merupakan unsur terpenting dari suatu negara. Alasannya, sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah, belum juga dapat diwujudkan suatu negara jika terdapat segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun hidup bersama itu.¹⁶

Sedangkan menurut Antonio Gramsci, “Negara merupakan sejumlah aktivitas praktek dan teori yang kompleks, di mana kelas yang berkuasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi, tetapi mengaturnya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuasaan di luarnya.”¹⁷

¹⁵Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 610.

¹⁶Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet. ke-1, h. 190.

¹⁷Nazar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. ke-1, h. 146.

Senada dengan pendapat ini, Arief Budiman seperti dikutip oleh Haryadi juga menulis:

Negara hanyalah alat dari kelas yang berkuasa. Tetapi, karena pemihakan seperti ini bisa membuat negara kehilangan keabsahannya sebagai penguasa sebuah masyarakat, negara membuat sebuah ideologi. Melalui ideologi inilah negara berusaha menyembunyikan perbuatannya yang berpihak pada kelas yang dominan, supaya kekuasaannya mendapatkan keabsahan dari seluruh rakyat yang dikuasainya.¹⁸

Kalau kita mengacu kepada pendapat Gramsci dan Arief Budiman, maka jelas dominasi politik dan kekuasaan negara sangatlah besar terhadap masyarakat sipil (*civil society*). Fenomena inilah yang pernah dialami oleh Plato. Ia kecewa menyaksikan bagaimana negara telah dijadikan alat untuk memuaskan keinginan para penguasa. Ia juga melihat betapa buruknya sistem pemerintahan yang ada pada masa itu. Negara menjadi rusak dan buruk akibat penguasa yang korup.¹⁹ Menurut hemat Plato, nasib Athena hanya dapat tertolong dengan mengubah sama sekali dasar hidup rakyat dan sistem pemerintahan. Itulah alasan baginya untuk menciptakan bentuk suatu negara yang ideal.²⁰

Jostein Gaarder penulis buku “Sophie’s World” mengatakan bahwa negara ideal yang dimaksud Plato tersebut adalah negara bayangan dan ideal atau yang dinamakan dengan *negara utopis*, yakni sebuah negara yang diperintah oleh para filsuf. Bagi Plato mereka inilah yang dipandang mampu menuntun akalinya menuju kebijaksanaan. Terciptanya sebuah negara yang baik tergantung pada apakah negara itu diperintah oleh akal. Sebagaimana kepala mengatur tubuh, maka filsuflah yang harus mengatur masyarakat.²¹

Plato berpendapat bahwa negara dan manusia memiliki persamaan, oleh sebab itu masalah moralitas haruslah merupakan yang paling utama yang harus diperhatikan dalam kehidupan bernegara, bahkan harus menjadi yang paling hakiki dalam keberadaan hidup para penguasa dan seluruh warga negara selaku manusia. Bagi Plato negara ideal adalah suatu

¹⁸Haryadi, *Lenin: Pikiran, Tindakan dan Ucapan....*, h. 6.

¹⁹Rapar, *Filsafat Politik Plato....*, h. 58-59.

²⁰Hatta, *Alam Pikiran Yunani....*, h. 108.

²¹Jostein Gaarder, *Sophie’s World*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Dunia Sophie : Sebuah Novel Filsafat*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. ke-5, h. 111.

komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan. Inilah pengertian negara menurut Plato.

Selanjutnya, menurut Plato, negara ideal pada hakikatnya adalah suatu keluarga. Ia mengatakan: "... di dalam negara kamu semua bersaudara."²² Karenanya setiap warga negara haruslah bersikap kekeluargaan yang mencerminkan adanya kerukukunan dan keharmonisan antara sesama. Baik di kalangan elite pemerintahan maupun rakyat.

2. Asal-mula Negara

Organisasi kelompok merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial politik. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan makan sehari saja diperlukan banyak bantuan dari pihak lain. Demikian juga untuk menjamin keamanan jiwa, tiap orang memerlukan bantuan dari sesamanya untuk pembelaan diri dari ancaman. Di sinilah perlunya ada negara untuk mengatur lalu lintas aktivitas kerjasama agar tercapai tujuannya.

Masyarakat Athena, selama berabad-abad, dari satu generasi ke generasi berikutnya, meneruskan kepercayaan mereka yang mengatakan bahwa negara Athena diciptakan oleh dewa Kekrops yang kemudian menjadi raja Athena yang pertama.²³

Pada zaman Socrates dan Plato, doktrin teokratis tentang asal-mula negara yang demikian itu telah memudar popularitasnya oleh karena munculnya ajaran kaum sofis. Protagoras, seorang tokoh terkemuka kaum sofis, mengatakan bahwa negara dicipta oleh manusia itu sendiri. Pada mulanya manusia hidup sendiri-sendiri, namun ternyata hidup sendiri-sendiri itu mengundang terlalu banyak gangguan dan kesulitan, terutama yang berasal dari luar dirinya sendiri, misalnya gangguan binatang buas, bencana alam, dan lain-lain. Menyadari bahwa manusia secara sendiri-sendiri begitu sulit untuk menguasai gangguan dan kesulitan serupa itu, maka manusia mulai hidup berkelompok dan kemudian membentuk negara.

²²Rapar, *Filsafat Politik Plato*..., h. 59.

²³Rapar, *Filsafat Politik Plato*..., h. 61.

Ajaran Protagoras ini ternyata cukup mempengaruhi pemikiran Plato. Ia membenarkan ajaran Protagoras yang mengatakan bahwa negara dicipta atau dibentuk oleh manusia. Namun Plato melihat bahwa gangguan dan kesulitan yang harus diatasi oleh manusia bukan hanya berasal dari dirinya sendiri. Bagi Plato, asal-mula negara dimulai dengan keinginan dan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beranekaragam yang tidak dapat terpenuhi dan terpuaskan oleh kekuatan dan kemampuan diri sendiri.²⁴

Keinginan dan kebutuhan tersebut tidak hanya dapat dipenuhi apabila manusia bersatu dan bekerjasama untuk dapat saling mencukupi kekurangannya masing-masing, maka bagi Plato, negara haruslah dilihat sebagai suatu sistem pelayanan yang mengharuskan setiap warga negara secara bertanggung jawab, saling mengerti, saling memberi dan menerima, saling menukar jasa, saling memperhatikan kebutuhan sesama warga, dan saling membangun. Teori Plato tentang asal-mula negara ini juga diterima dan dikembangkan oleh pemikir Barat Modern seperti Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau.²⁵

Dengan demikian jelas terlihat bahwa negara ideal Plato bukanlah negara khayalan (utopis). Adalah suatu kekeliruan yang amat besar apabila ada orang yang mengira bahwa Plato menciptakan negara idealnya itu sebagai tempat pelarian dari berbagai kenyataan yang tak dapat disenanginya dan pengalaman pahit yang begitu menyakitkan hatinya agar ia dapat tenggelam ke dalam dunia impian dan khayalan yang mengasikkan. Sesungguhnya Plato berusaha menciptakan suatu negara ideal yang realistik.²⁶

3. Tujuan Negara

Bilamana Plato mengatakan bahwa asal mula negara itu terletak dalam keinginan dan kebutuhan manusia, maka itu berarti bahwa negara dibentuk oleh dan untuk manusia. Sesuai dengan ajaran etik yang dikembangkannya,

²⁴Rapar, *Filsafat Politik Plato*..., h. 61-62.

²⁵Haryadi, *Lenin, Pikiran, Tindakan dan Ucapan*..., h. 2-3.

²⁶Rapar, *Filsafat Politik Plato*..., h. 63.

bagi Plato tujuan negara sinkron dengan tujuan hidup manusia, yaitu kesenangan dan kebahagiaan seluruh warga negara.²⁷

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesenangan hidup oleh Plato itu bukanlah memuaskan hawa nafsu di dunia ini. Akan tetapi kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya ide kebaikan orang harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang baik bagi masyarakat, baik pula bagi orang-seorang. Antara kepentingan orang-seorang tidak boleh ada pertentangan.²⁸

Dalam kaitan ini Plato kembali menyebutkan salah satu persoalan pokok di dalam negara, yakni keselamatan rakyat yang diperintah, bukan keselamatan orang yang memerintah. Orang-orang yang memerintah haruslah mempersembahkan hidup mereka bagi pemerintahan dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri.²⁹

Untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaan hidup, sebagaimana dijelaskan di atas, manusia harus memiliki pengetahuan yang akan menjadikannya bijak untuk menyelami segala sesuatu sampai kepada idenya. Karena ide yang tertinggi berada di dunia ide ialah ide kebaikan, maka kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya terletak pada keberhasilannya untuk menghidupi suatu kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Dalam konteks ini, maka negara ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebaikan dan kebajikan. Lebih rinci lagi dalam bukunya *Republic*, Plato memaparkan negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Hanya negara yang demikian itulah yang sanggup mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati bagi setiap warganya.³⁰

Tujuan negara yang dirumuskan Plato tersebut tampaknya memiliki persamaan dengan tujuan negara Islam (baca: negara menurut Islam) yang dikemukakan oleh Husain Haikal, seorang pemikir reformis Mesir. Menurutnya tujuan negara Islam adalah mewujudkan keadilan, kebebasan,

²⁷Rapar, *Filsafat Politik Plato*..., h. 63.

²⁸Hatta, *Alam Pikiran Yunani*..., h. 106.

²⁹Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*..., h. 43-44.

³⁰Rapar, *Filsafat Politik Plato*..., h. 64-65.

dan kesejahteraan seluruh warga negara berlandaskan nilai-nilai spiritual.³¹

Akhirnya Plato berharap bahwa setiap warga negara haruslah melaksanakan kewajibannya, dan sebaliknya negara haruslah menunaikan hak warganya. Negara ideal harus dapat mendudukan hak dan kewajiban pada tempat yang tepat dan mengatur serta menjaga agar keduanya senantiasa selaras dan serasi, karena hanya dengan cara itulah negara dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan yang diidamkan oleh seluruh warga negara.³²

4. Bentuk-bentuk Negara

Dalam bukunya *Republic* bagian VIII, Plato menyebutkan ada lima macam bentuk negara. Menurutnya kelima bentuk negara itu tidak dapat hidup kekal, karena dasar-dasar kehidupan yang prinsipil yang dijalankan mengubah kesehatan mereka menjadi sakit, dan akhirnya membunuh mereka. Bentuk-bentuk negara itu adalah :

- a. Aristokrasi: penguasa pemerintahan dari kalangan cendekiawan atau para budiman yang memerintah dengan bijaksana dengan berpedoman pada keadilan.
- b. Timokrasi: pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang bertujuan mencapai kemasyhuran dan kehormatan, bukan untuk menciptakan keadilan.
- c. Oligarki: tampuk pemerintahan dipegang oleh golongan hartawan dan tujuan mereka adalah untuk memperkaya diri sendiri.
- d. Demokrasi: pemerintahan berada di tangan kalangan rakyat biasa dimana kebebasan sangat diutamakan.
- e. Tirani: bentuk pemerintahan yang menindas bahkan menelan rakyatnya, sehingga dia berkuasa dengan sewenang-wenang dan tak terbatas. Tirani itu timbul akibat kemerosotan demokrasi. Tirani merupakan bentuk yang paling jauh dari bentuk negara ideal yang didambakan Plato.³³

³¹Mulia, *Negara Islam*.... h. 200-201.

³²Rapar, *Filsafat Politik Plato*...., h. 66.

³³Rapar, *Filsafat Politik Plato*...., h. 67-72.

Lewat dialektika, Plato membuktikan bahwa aristokrasi adalah bentuk negara yang paling ideal. Secara harfiah aristokrasi, terdiri dari kata *aristos*: paling baik dan *kratein*: menguasai. Hal ini menurut Plato dikarenakan hanya warga negara yang paling baik dan paling cakap yang boleh diangkat menjadi pemimpin negara.³⁴ Plato kemudian menyadari bahwa negara ideal yang didambakannya, dimana suatu negara yang dipimpin dan diperintah oleh cendekiawan atau yang disebutnya sebagai filsuf raja merupakan negara yang terlalu sempurna bagi manusia. Di dalam *Republic* buku IX, hal itu pun diungkapkannya terlebih dahulu, bahwa sesungguhnya negara ideal itu tidak berada di dunia ini tetapi di langit yaitu di dunia ide di mana pola negara ideal itu tersimpan dengan baik.³⁵

Plato pun akhirnya membuat klasifikasi negara yang lebih baik lagi dan realistis di dalam karyanya yang berjudul *Politicus*. Dalam buku ini Plato menyebutkan ada enam bentuk negara yang kemudian dibaginya kepada dua bagian yakni tiga bentuk dari golongan yang mengenal hukum dan tiga bentuk dari golongan yang tidak mengenal hukum. Dari golongan yang mengenal hukum, yaitu negara yang memiliki undang-undang; bentuk negara yang terbaik ialah *monarki*, lalu *aristokrasi*, dan kemudian *demokrasi*. Sedangkan dari golongan yang tak mengenal hukum, yakni negara yang tidak memiliki undang-undang; bentuk negara terbaik ialah *demokrasi*, kemudian *oligarki*, dan yang terburuk ialah *tirani*.³⁶

Hal menarik dari teori yang terakhir itu ialah adanya dua bentuk negara demokrasi, yakni demokrasi dari negara yang memiliki undang-undang dan demokrasi dari yang tidak memiliki undang-undang. Demokrasi dari yang memiliki undang-undang adalah bentuk yang terburuk, sedangkan demokrasi dari negara yang tak memiliki undang-undang adalah bentuk yang terbaik. Jelas pula terlihat bahwa kedua bentuk demokrasi itu memiliki tempat yang lebih baik dari pada oligarki yang di dalam *Republic* menempati urutan di atas demokrasi.

³⁴K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani, dari Thales ke Aristoteles*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), Cet. ke-13, h. 120.

³⁵Rapar, *Filsafat Politik Plato*..., h. 72.

³⁶Rapar. *Filsafat Politik Plato*..., h. 72-73.

Dari analisis Plato, bahwasanya semua bentuk negara itu tidak ada yang kekal dan abadi, sesuai dengan sifat dan kondisi jiwa manusia yang selalu berubah. Negara aristokrasi yang merupakan *the rule of the best* menurut Plato bisa saja berubah menjadi sistem timokrasi dikarenakan pemimpinnya tidak lagi mengindahkan kepentingan rakyatnya, bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya negara tirani.³⁷ Namun terlepas dari berbagai macam bentuk negara tersebut, adalah yang paling prinsipil bagi eksistensi sebuah negara yakni bagaimana sistem pemerintahannya dijalankan dengan bijaksana, senantiasa berorientasi kepada kepentingan bersama agar dengan demikian keadilan dan kebajikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara.

Negara Ideal Plato: Antara Utopia dan Realitas

Bertrand Russell menyebutkan bahwa negara yang ingin dibangun Plato adalah “negara utopia”³⁸. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa utopia berarti “sistem politik yang sempurna yang hanya ada di bayangan (khayalan) dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan.”³⁹ Kalau demikian secara sepintas memang konsep negara yang diinginkan Plato seolah-olah hanyalah khayalan dan tidak mungkin diterapkan dalam kehidupan nyata.

Dalam pemikiran Plato tentang negara sangat banyak nilai luhur yang bisa dijadikan sebagai etika dalam membangun dan memimpin sebuah negara. Plato menegaskan bahwa sebuah negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Franz Magnis Suseno dalam bukunya “13 Tokoh Etika” menyebutkan bahwa ada empat keutamaan yang paling utama, yaitu: kebijaksanaan, keberanian, sikap tahu

³⁷Rapar, *Filsafat Politik Plato*...., h. 68-69.

³⁸Bertrand Russell, *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko dkk dengan Judul *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondidi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 146.

³⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1257.

diri, dan keadilan.⁴⁰ Nilai-nilai yang disebutkan Plato merupakan nilai yang sangat relevan dengan realitas yang dihadapi manusia sekarang, dimana manusia saat ini masih memperjuangkan tegaknya suatu keadilan, berani dalam menegakkan kebenaran, mampu mengendalikan diri dan emosi, serta memiliki kebijaksanaan dalam memimpin negara dan dalam kehidupan bernegara secara luas.

Plato menyebutkan bahwa pemerintah haruslah mempersembahkan hidup mereka bagi negara dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hal ini jelaslah bahwa pemerintah tidak sewajarnya dalam memerintah hanya untuk memperkaya diri dan kelompoknya, tanpa memperhatikan keadaan rakyat yang diperintahnya. Sebuah negara haruslah memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga kebahagiaan dalam kehidupan dapat terwujud di semua golongan.

Bertrand Russell juga menyebutkan bahwa Republiknya Plato kemungkinan dimaksudkan untuk benar-benar diwujudkan. Hal itu bukanlah suatu yang ganjil atau mustahil sebagaimana umumnya pandangan orang. Ide negara Plato memang telah diterapkan oleh bangsa Sparta. Pemerintahan oleh para filsuf sudah pernah diupayakan oleh Pythagoras, Architas (pengikut Pythagoras). Bahkan negara Republik juga pernah didirikan di wilayah pesisir Spanyol. Akan tetapi dalam perkembangannya, negara-negara Republik yang merupakan negara-negara kecil, akhirnya mengalami berbagai kemunduran yang diakibatkan oleh peperangan dan persaingan dengan negara yang lebih besar.⁴¹

Penutup

Menurut Plato negara ideal adalah suatu komunitas etis untuk mencapai kebajikan. Pada hakikatnya negara adalah suatu keluarga, dimana mereka yang menjadi warganya menjunjung tinggi persaudaraan. Plato juga mengatakan bahwa negara memang diciptakan atau dibentuk oleh manusia. Terbentuknya negara dikarenakan adanya keinginan dan kebutuhan manusia

⁴⁰Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad-19*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 23.

⁴¹Russell, *History of Western Philosophy...*, h. 160.

yang tidak dapat terpenuhi secara perorangan. Satu hal yang penting negara haruslah menjadikan dirinya sebagai sistem pelayanan, sehingga eksistensi negara selalu dibutuhkan rakyatnya di segala zaman.

Tujuan negara menurutnya adalah mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan seluruh warga negara berlandaskan keadilan, kearifan, keberanian, atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Untuk merealisasikan tujuan negara tersebut, warga negara harus memiliki pengetahuan, terutama tentang ide kebaikan, serta mengaplikasikannya dalam segala aspek kehidupan.

Mengenai bentuk negara yang diidamkan Plato adalah “negara aristokrasi”, yakni suatu pemerintahan yang dipimpin oleh cendekia-wan atau filsuf yang bijaksana dengan berpedoman pada keadilan. Negara utopia Plato memang pernah diaplikasikan oleh filsuf seperti Pythagoras, namun dalam perkembangannya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh peperangan. Yang terpenting dari konsep negara utopia Plato adalah muatan nilai-nilai etis yang tentunya sangat relevan dengan realitas manusia sekarang, dimana nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang diperjuangkan di tengah-tengah bangsa kita saat ini []

DAFTAR PUSTAKA

- Gaarder, Jostein, (1998). *Sophie's World*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*, Bandung: Mizan.
- Hadiwijono, Harun, (1993). *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius.
- Haryadi, Edy, (2000). *Lenin: Pikiran, Tindakan dan Ucapan*, Jakarta: Komunitas Studi Untuk Perubahan.
- Hatta, Mohammad, (1996). *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulia, Musdah, (2001). *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina.
- Patria, Nazar dan Andi Arief, (1999). *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rapar, J.H., (1991). *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Russell, Bertrand, (2007). *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondidi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Terj. Sigit Jatmiko dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suseno, Franz Magnis, (1997). *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad-19*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Maula (ed.), (1999). *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Tim Penulis Rosda, (1995). *Kamus Filsafat*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Titus, Harold H., *et.al.*, (1984). *Persoalan-persoalan Filsafat*, Terj. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang.